

Available online at: <https://ejournal.fah.uinib.ac.id/index.php/khazanah>**Khazanah: Jurnal Sejarah dan
Kebudayaan Islam**ISSN: 2339-207X (print) ISSN: 2614-3798 (online)
DOI: <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.185>**Khazanah**
Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam**PERS PASCA ORDE BARU:
SEBUAH TINJAUAN SEJARAH KONTEMPORER****Aditia Muara Padiatra**Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
*email: aditiamuara@gmail.com***Anwar Sanusi**Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
*email: ucianwarsanusi@yahoo.com***Abstrak**

Pers adalah setiap kegiatan dalam mengelola informasi, dalam artian informasi apa saja, mulai dari membaca surat kabar, menonton televisi di depan ruang tamu, ataupun hanya sekedar berselancar di internet, kesemua kegiatan ini membuat kita bersentuhan kepada hal yang disebut dengan media atau pers. Dalam setiap masanya dalam belantika sejarah Indonesia, pers mempunyai kisahnya sendiri yang menarik untuk diteliti, tidak terkecuali pula pada masa pasca Orde Baru atau masa reformasi dimana pers dianggap bebas dalam memberitakan segala informasi, bahkan cenderung kebablasan. Menarik untuk disimak bagaimana para sejarawan merespon pers pada masa ini sebagai bagian dari historiografi kontemporer yang ada di Indonesia.

Keywords : Sejarah, Pers, Reformasi

Abstract

Press denotes any activity in information management -any information- from reading the newspapers, watching television in the living room, or merely surfing the web. In every chapter of Indonesian history, the press appeared to have unique story merited a serious study. Especially in the post-New Order era, or the reformation era, where the journalists experienced total freedom in their job. It is interesting to learn how the historians study the press as the part of contemporary Indonesian historiography.

Keywords : History, Press, Reformation

PENDAHULUAN

Pers adalah setiap kegiatan dalam mengelola informasi, dalam artian informasi apa saja, mulai dari membaca surat kabar, menonton televisi di depan ruang tamu, ataupun hanya sekedar berselancar di internet, kesemua kegiatan ini membuat kita bersentuhan kepada hal yang disebut dengan media atau pers. Meruntut kepada Onong Uchjana Effendy¹, pers dinilai mempunyai dua pengertian, yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam artian yang sempit. Pers dalam arti sempit adalah media cetak, surat kabar, tablid mingguan, dan sebagainya. Sedangkan, pers dalam artian yang luas adalah meliputi media masa cetak dan elektronik.

Pers sendiri di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, hal ini sendiri mafhum adanya mengingat kontak bangsa ini dengan media komunikasi telah terjadi sejak jaman penjajahan belanda dan digunakan untuk kepentingan kolonial. Meruntut pada catatan sejarah yang ada, perjalanan pers di bumi nusantara bermula ketika mesin cetak mulai masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1624, mesin ini sendiri bawa oleh para misionaris gereja protestan kala itu yang diperuntukkan untuk menerbitkan literatur-literatur keagamaan guna kegiatan zending atau penyebaran agama yang mulai digalakkan pada saat itu. Namun, karena ketiadaannya tenaga, maka mesin cetak itu tidak terpakai dalam jangka waktu yang cukup lama dan baru dipergunakan secara aktif pada tahun 1659 dengan kedatangan Kornelis Pijl, seorang misionaris kristiani dari Belanda yang mempunyai pengetahuan dalam menjalankan mesin tersebut².

Meruntut kepada hal tersebut, Kornelis lah yang kemudian memperkenalkan sarana pers atau media cetak kepada perusahaan dagang *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) Di Hindia Belanda pada saat itu. Hal ini menjadi inspirasi bagi para petinggi VOC yang pada akhirnya tertarik untuk menggunakan sarana media cetak itu untuk keperluan administrasi perusahaannya. Setelahnya, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron Van Inhoff, didirikan lah sebuah percetakan dan didatangkan alat percetakan yang lebih baru langsung dari Belanda untuk melakukan kegiatan percetakan. Produk awal dari percetakan ini kemudian ialah dokumen perjanjian Bonggaya antara Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dokumen ini dicetak oleh Hendrick Brant pada pertengahan tahun 1668, dimana Ia mendapat lisensi pemerintah untuk mencetak dan menjilid buku atas nama perusahaan dagang VOC.³

Namun kegiatan percetakan ini sendiri kemudian setelahnya hanya berada pada lingkup administratif guna kepentingan perusahaan dagang dan belum terlihat upaya untuk menjadikan percetakan tersebut memproduksi surat kabar guna kepentingan informasi publik. Keadaan ini kemudian berubah setelah munculnya Jan Erdman Jordens, seorang pengusaha yang diperbantukan pada bagian administrasi pada kantor dagang VOC. Ia mempunyai ide untuk menggunakan mesin cetak tersebut guna menerbitkan sebuah media cetak demi kepentingan perdagangan, hal ini kemudian Ia realisasikan dengan menerbitkan sebuah surat kabar yang bernama *Bataviasche Nouvelle* yang terbit pada 8 Agustus 1744⁴, surat kabar ini sendiri berisikan lembaran

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

² Umi Rusmiani Umairah Danil Mahmud Chaniago, "Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan*

Kebudayaan Islam 8, no. 16 (2018): 27–43, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.72>.

³ Danil Mahmud Chaniago.

⁴ Godfried Hariowald Von Faber, *A Short History of Journalism in Dutch East Indies* (Surabaya: G. Kolff & Company, 1930).

informasi mengenai iklan-iklan dan berita kapal serta kejadian dimana *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) Belanda melakukan kegiatan perdagangannya.

Kala itu, hampir seluruh halaman yang ada didalam surat kabar dipenuhi oleh iklan dan tidak begitu disukai oleh pemerintahan dagang VOC kala itu karena dianggap membocorkan kegiatan perdagangannya kepada pihak rival. Hal inilah yang kemudian menyebabkan umur penerbitannya sendiri menjadi tidak lama, hanya setahun, sebelumnya pada akhirnya harus menerima pembredelan pada 20 Juni 1746⁵.

Setelah era dari *Bataviaasche Nouvelle* yang merupakan awalan dari sejarah pers di nusantara, muncul kemudian era surat kabar atau pers peranakan yang berbahasa Indonesia, era ini merupakan masa penting bagi perkembangan nasionalisme di Indonesia, karena melalui media surat kabar inilah bibit-bibit kesadaran akan nasionalisme mulai berkembang dan tertanam dikalangan para kaum-kaum terdidik yang mulai muncul pada masa tersebut⁶.

Menilik hal yang disebutkan diatas, pers dalam hal ini menjadi pelecut bagi tumbuhnya perasaan kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia, sesuatu yang sangat penting untuk menjadi awal dari semangat persatuan dan kesatuan yang kemudian melekat guna meraih kemerdekaan penuh lepas dari belenggu penjajahan.

Setelahnya pers kemudian menemui jalan sebagai alat penyebaran informasi yang luas dikalangan masyarakat, namun penyebaran benih-benih nasionalisme dan kemerdekaan pada masa ini sendiri masih terhambat oleh sekat-sekat rasial yang memang sengaja dilakukan oleh penjajah kala itu untuk dapat lebih mudah

mengkategorisasi dari mana suatu individu berasal dan melakukan pengawasan pada tiap-tiap kelompok tersebut, dalam hal ini pers pada akhirnya kemudian menjadi terkelompok dalam situasi yang sama, dan pada akhirnya terkategori menjadi beberapa bagian, dalam hal ini seperti pers kolonial yang terdiri atas surat kabar-surat kabar milik para kapitalis Belanda yang umumnya pro terhadap kebijakan kolonial yang ada di wilayah tanah Jajahan, pers pribumi yang terdiri atas surat kabar seperti *Medan Prijaji* pimpinan Tirto Adi Soerjo yang berusaha menunjukkan eksistensi dan mengangkat derajat kaum bumiputera ditengah pergumulan pers yang ada kala itu, serta kemudian pers cina peranakan dimana surat kabar ini biasanya dimiliki oleh para golongan Tionghoa yang berisi mengenai berita-berita mengenai kelompoknya serta bisnis perdagangan yang menjadi bagian lekat dari golongan tersebut⁷.

Situasi segregasi atau terkotak-kotak berdasarkan pola rasial ini pada akhirnya kemudian berubah setelahnya pada akhir masa kekuasaan kolonial, dimana kala itu Belanda sebagai penjajah harus lela menyerahkan Hindia Belanda atau nusantara ke tangan tentara pendudukan Jepang yang masuk ke wilayah asia tenggara pada kancah perang dunia ke II.

Pers, dalam hal ini kemudian mengalami perubahan signifikan, dari yang sebelumnya menjadi penyebar informasi kepada khayalak luas dengan berdasarkan fakta dan data yang ada, kemudian mengalami situasi sebagai corong propaganda tanpa pamrih bagi kebijakan perang selama pendudukan Jepang tersebut, pers dalam hal ini menjadi pencetak slogan-slogan dan dukungan penuh bagi setiap program-program yang dijalankan oleh

⁵ David T Hill, *Pers Di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011).

⁶ Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers Dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).

⁷ Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus Ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan Dan Pemberangusan 1906-1942* (Jakarta: Hasta Mitra dan Pustaka Utan Kayu, 2003).

pemerintahan pendudukan Jepang yang ada pada saat itu. Mulai dari program sosial, seperti pengerahan *romusha* atau tenaga kerja bagi kepentingan perang, penanaman pohon jarak, sampai kepada propaganda mengenai hebat dan digidinya Jepang sebagai negara yang menjadi pemimpin diseantero Asia Timur Raya.

Pemberitaan-pemberitaan yang dihadirkan kemudian pun menjadi tidak *cover both side* atau berat sebelah, dalam artian selalu berkisah mengenai kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh para tentara Jepang dalam peperangannya diberbagai front pertempuran pada perang dunia ke II melawan pasukan sekutu kala itu. Walaupun dalam beberapa hal, pemberitaan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan terjadi⁸.

Sampai pada kemudian Indonesia menemukan berjibaku dan menemukan kemerdekaannya pada tahun 1945, pers pun berubah wajah dan bentuk menjadi lebih bebas dan demokratis, masa-masa dimana pers berada pada momentum tersebut adalah pada masa Demokrasi Parlementer, dimana pers kemudian mendapatkan kebebasannya sebagai pers dalam artian yang utuh. namun hal ini kemudian menimbulkan pula efek samping dimana kala itu pers menjadi corong dari berbagai macam ideologi dan kecenderungan partai politik tertentu, pers dalam hal ini, pada saat itu menjadi alat perjuangan bagi setiap partai-partai politik yang ada untuk mencapai tujuan dan keinginannya masing-masing⁹. Pada masa itu ada beberapa istilah atau adagium yang

⁸ Nanda Julian Utama, "Slogan-Slogan Kebohongan: Propaganda-Propaganda Politik Jepang Tentang Perang Pasifik Pada Koran Asia Raya Di Indonesia 1944-1945," in *International Conference on Language, Culture, and Society 2015 (ICLCS)* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015).

⁹ Abdurrachman Surjomiharjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia* (Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, 1980).

populer dikalangan surat kabar atau pers, yakni adanya "pers partisan", atau pers yang berpihak kepada suatu kelompok atau kepentingan tertentu serta "perang surat kabar", yang mempunyai artian saling serang melalui tulisan antara surat kabar yang satu dengan surat kabar lainnya yang berbeda haluan ideologi guna semakin menguatkan soliditas bagi para pendukungnya dan sebagai cara untuk dapat meningkatkan tiras daripada surat kabar yang diterbitkan pada saat itu.

Hal ini kemudian berubah secara berangsur-angsur dimana pers selalu berhadapan dengan tindakan-tindakan anti pers yang dilakukan oleh pemerintahan dibawah kepemimpinan Soekarno, melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan, pers dalam hal ini dijadikan sebagai perpanjangan kekuasaan bagi kekuasaan presiden Soekarno pada saat itu untuk dapat mengukuhkan kekuasaannya. Alhasil pada saat itu pers-pers yang dianggap membelot dan tidak tertib terhadap kekuasaan Orde Lama itu dibredel dan sebagian diri lebih memilih untuk menutup secara mandiri penerbitannya.¹⁰ Hal ini kemudian berubah kemudian sesaat ketika masa presiden Soeharto atau yang lebih dikenal kemudian dengan nama masa Orde Baru, dimana pers kala itu mendapatkan angin segar kebebasan guna mengungkapkan informasi-informasi yang ada sebagaimana terjadi, walaupun hal ini kemudian juga tidak berlangsung lama, karena tidak beberapa lama kemudian pemerintah kala itu juga melakukan tindakan anti pers dengan membredel beberapa pers yang dianggap kritis kepada pemerintah Orde Baru pada saat itu¹¹.

Pers, dalam hal ini menjadi simbolisasi bagi perwujudan wajah masyarakatnya pada setiap-setiap

¹⁰ Edward Cecil Smith, *Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Graffiti Pers, 1983).

¹¹ Akhmad Zaini Abar, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 1995).

zamannya. Hal ini tentunya menjadikan pers mempunyai artian penting dalam setiap rekaman masa lalu yang ada dimasyarakat. Sebagaimana layaknya sebuah alur sejarah, setiap peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh pers pada setiap masanya tentunya mempunyai kadar keunikannya tersendiri, hal ini kemudian menjadikan sejarah pers di Indonesia menjadi sebuah kisah yang dinamis dan menarik untuk ditilik. Satu hal yang kemudian dapat dicatat, bahwa dalam setiap kisahnya tersebut, pers selalu mendapat porsi yang cukup penting, yakni sebagai media informasi kepada masyarakat dan sekaligus juga sebagai *watchdog* bagi pemerintah untuk menjadi awas terhadap persoalan-persoalan yang terkadang luput dari perhatian mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan 4 langkah utama: heuristic, yaitu pengumpulan sumber. Sumber-sumber yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui kelayakannya sebagai sebuah sumber penelitian. Langkah ini biasa disebut sebagai kritik sumber (internal atau eksternal). Langkah selanjutnya adalah sintesis. Kemudian baru dituangkan dalam bentuk tulisan. Langkah terakhir ini disebut juga sebagai historiografi.

PEMBAHASAN

Pers Pasca Orde Baru: Kebebasan atau “Kebablasan”?

Reformasi adalah sebuah peristiwa perubahan atas sistem yang begitu lama melingkupi masyarakat Indonesia, dalam hal ini masa Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto. Digalangi oleh berbagai tokoh dan insan akademika dan dimotori gerakannya oleh para mahasiswa dan massa rakyat, Reformasi menjadi titik balik yang berarti dalam dunia pers dan media yang ada di tanah air, masa ini terjadi setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala

negara dan digantikan oleh B.J Habibie sebagai presiden ketiga pada tanggal 21 Mei 1998¹². Selepas itu, reformasi pun terjadi dalam berbagai bidang, tidak terkecuali pula dalam segi media massa dan pers yang ada di tanah air. Hal ini tentunya membawa dampak positif, setelah sebelumnya pers begitu terkungkung pada masa kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto.

Salah satu ciri penting pada pers yang hidup pada masa pasca Orde Baru atau reformasi ini adalah bentuknya yang bebas dan independen. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa tanpa pers yang bebas dan independen, sebuah negara akan sulit dikatakan sebagai negara yang demokratis. Seringkali dituduhkan bahwa pers yang bebas dan independen merupakan sandungan bagi stabilitas suatu negara, namun yang sebenarnya dikhawatirkan adalah kestabilan daripada kelompok yang sedang berkuasa tersebut. Anekdot ini yang kemudian menguatkan pandangan bahwa bagi sebuah masyarakat yang demokratis maka kebebasan dan independensi pers layak untuk dijaga.

Ditilik pada langgam sejarah pers yang ada pada masa lalu, pers Indonesia kini memasuki sebuah fase baru, setelah sebelumnya berjibaku dan berjuang melalui sejarah panjang, mulai dari masa geliat kemunculannya pada periode penjajahan, mulai bersuara pada pergerakan kemerdekaan dan masa Jepang, serta naik turun pada masa Orde Lama dibawah kekuasaan presiden Soekarno dan masa Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto. Pers, yang sebelumnya selalu dijejali dengan peraturan yang berbelit dan keharusan membuat pemberitaan “berpihak” terhadap suatu rezim tertentu, kini seakan begitu bebas dan lepas dalam

¹² Anhar Gonggong, ed., *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi* (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005).

menyuarakan pendapat dan pemberitaannya ke muka publik.

Meruntut kepada hal tersebut, era reformasi tak pelak telah membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk mengeksplorasi kebebasan. Kebebasan ini pada akhirnya menyeruak pada berbagai sisi kehidupan pers, bersamaan dengan hal tersebut reformasi juga menghadirkan suatu sistem kebebasan berkompetisi bagi pers dan para media massa yang ada pada saat itu untuk dapat bersaing satu sama lain guna meningkatkan tiras dan berebut para pembaca setia. Hal ini kemudian berakhir pada munculnya suatu dampak yang kemudian juga dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

Dampak tersebut antara lain ialah lebih terlihatnya suatu eksploitasi pada pemberitaan pers atau media massa yang ada pada saat ini, yang jauh dari eksplorasi dalam pemberitaan-pemberitaan yang meruntut kepada fakta yang jelas dan benar. Sejumlah kejengkelan dan keluhan pun lantas bermunculan, hal ini khususnya menyasar terhadap kebebasan pers di era reformasi yang kemudian dianggap semena-mena dan serampangan dalam memberitakan apa saja secara terus menerus walaupun tanpa fakta yang jelas, para penikmat media mengeluhkan bagaimana pers kini “kebablasan” dalam menyajikan berita, mengumbar sensasi, dan informasi-informasi eksploitatif demi rating dan nilai jual yang tinggi.

Hal tersebut terjadi tidak dapat dipungkiri akibat lemahnya peranan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegur ataupun menindak “tegas” pers seperti pada masa-masa sebelumnya, yakni pada Orde Lama dan Orde Baru, disisi lain dibubarkannya Kementerian Penerangan yang diampu oleh Harmoko pada akhir kekuasaan Orde Baru juga turut andil dalam ‘kebablasan’ pemberitaan pers pada masa awal reformasi tersebut. Setelah halangan struktural kebebasan pers berhasil dilepaskan, kini kebebasan

tersebut yang seakan memunculkan berbagai persoalannya sendiri, yang bahkan lebih kompleks ketimbang pada era tirani kekuasaan, kebebasan pers yang kini berkembang di Indonesia telah makin ditanggapi negatif oleh berbagai pihak, karena dianggap telah “terlampau bebas” atau “kebablasan”.

Kenyataan pers yang menjurus ke arah jurnalisme yang tidak sesuai dengan etika publik ini semakin menjadi ketika banyak bermunculan media-media yang mengusung jurnalisme alakadarnya dan kurang menghargai etika. Media-media tersebut saling sikut dan menyerang kelompok atau individu tertentu dengan pemberitaan-pemberitaan “miring” guna berebut meraih hati para pembaca, hal ini sendiri menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam kehidupan pers pada masa pasca Orde Baru, dimana munculnya segelintir media massa tersebut dalam dunia jurnalisme di tanah air.

Apabila dianalisa lebih lanjut, kebebasan yang kebablasan ini juga bukannya tanpa sebab. Pers, pada era reformasi terjebak dalam situasi yang saling berkelindan satu sama lain, dimana satu sisi kebebasan mulai menyeruak terasa didalam segala lingkup kehidupannya pasca keluar dari kekangan rezim otoriter yang sebelumnya, namun disisi lain hal ini *side effect* dimana banyak perusahaan surat kabar baru bermunculan dan memberikan saingan-saingan baru terhadap keamanan pers yang telah lama hadir.

Pergeseran Media: Dari Cetak ke Internet

Selain kemunculan pers yang “kebablasan” tersebut dan terjadinya persaingan-persaingan antara para penerbit surat kabar guna meraih pangsa pembaca, ada faktor lain yang kemudian menjadikan masa pasca Orde Baru menjadi suatu masa yang dinamis bagi pers atau media massa yang ada di Indonesia. Hal ini ialah mulai terjadinya

pergeseran segmen media, dari yang sebelumnya hanya berupa cetak dan nyata, kemudian menjadi digital atau daring. Pergeseran sendiri mulai terasa nampak dimana konsep jurnalisisme cetak pada era ini mulai bergeser ke arah digital, dimana media daring mulai menjadi bahan alternatif bacaan yang ada pada masa tersebut. Hal ini kemudian juga didorong dengan kondisi masyarakat yang semakin lama semakin berjalan secara cepat, sehingga membutuhkan sumber pemberitaan yang cepat dan tepat guna mengisi hari-hari mereka. Heru Margianto dan Asep Syaefullah yang merupakan Aliansi Jurnalis Independen, secara apik memabarkan fenomena ini didalam bukunya yang berjudul *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika* sebagai berikut:

The truth in the making, dogma jurnalistik tradisional yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi, “*get it first, but first get it truth*” seolah berubah menjadi “*get it first, just get it first*”.¹³

Meruntut kepada hal tersebut, masa reformasi tak pelak memberikan situasi gegap gempita dalam kehidupan pers yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian memberikan dampak yang tidak sedikit, khususnya dalam merubah pola kehadiran media, dari yang sebelumnya hanya bersifat cetak, kemudian berubah menjadi dalam wadah daring, dengan internet sebagai sumber tenaga utamanya.

Internet, dalam hal ini seakan membawa ruang publik untuk partisipasi dan peran serta setiap warga, setiap orang, baik itu profesional maupun amatir dalam luapan akses informasi dalam sebuah wadah digital. Internet, dalam hal ini menjadi peluang bagi para masyarakat kini untuk dapat

melihat informasi dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi saja. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat dan khalayak ramai menjadi semakin kritis dalam memilah-milah sebuah pemberitaan karena akses informasi yang luas dan membanjir dari segala arah.

Fenomena ini bukannya tanpa sebab, faktor utama perubahan tersebut adalah karena semenjak adanya media daring maka kemudian yang terjadi adalah akses dan kuasa informasi bukan lagi menjadi milik jurnalis ataupun pemilik media¹⁴. Disinilah yang kemudian menjadi titik tolak dari permasalahan yang ada, dimana terjadi perebutan ruang publik untuk informasi, dengan hadirnya internet para jurnalis profesional harus rela berbagi ruang dengan *twitter*, *blogger*, *facebook*, jurnalis warga, serta para pengguna media sosial.

Dalam hal ini internet tak pelak telah mengubah pola dan cara pandang daripada umat manusia di segala tempat, tak luput juga di Indonesia, untuk memproduksi dan mengkonsumsi daripada pemberitaan-pemberitaan yang kini ada dan berjejalan di sekelilingnya¹⁵.

Penulisan Sejarah Pers Kontemporer: Tantangan serta Peluang

Lantas bagaimana dengan sejarah? Sejarah, dalam hal ini dapat memposisikan diri sebagai wadah yang kemudian merekam kesemua gejala yang ada pada masa tersebut untuk kemudian dituliskan menjadi sebuah kisah sejarah yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Di sisi lain metodologi sejarah, selain dapat digunakan untuk menguji keabsahan

¹³ J Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Pembaca, Laba, Dan Etika Problematika Praktik Jurnalisme Online Di Indonesia* (Jakarta: AJI Indonesia – Ford Foundation, 2014).

¹⁴ Satria Kusuma, “Posisi Media Cetak Di Tengah Perkembangan Media Online Di Indonesia,” *Interact Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atma Jaya* 5, no. 1 (2016).

¹⁵ Kusuma.

dari sumber-sumber yang beredar terkait dengan fenomena tersebut, dalam hal ini juga dapat digunakan sebagai sarana kontemplatif atau perenungan atas fenomena yang ada guna kemudian ditelaah dan disarikan untuk dipelajari kemudian dimasa yang akan datang.

Hal ini menjadi kesempatan bagi keilmuan sejarah untuk dapat berperan serta didalam menelaah fenomena-fenomena kontemporer yang masih hangat di masyarakat, sesuatu yang, bahkan sampai dengan saat ini, masih dianggap sebagai domain dari keilmuan sosial, seperti sosiologi, ilmu politik, serta ilmu komunikasi.

Melalui metodologi sejarah yang diejawantahkan lebih lanjut misalnya, Kuntowijoyo, seorang sejarawan cum sastrawan mengetengahkan bahwa ada beberapa tahap dalam penerapan metode sejarah kedalam suatu tema penulisan, hal ini kemudian terlingkup dalam beberapa tahap yang kemudian dia sarikan menjadi 5 tahapan¹⁶, yaitu:

1. *Pemilihan topik*, menurutnya topik yang “workable” dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia, tidak terlalu luas, sehingga melampaui waktu.
2. Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, dua syarat tersebut, baik subjektif maupun yang objektif sangat penting, karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau dia senang dan dapat.
3. *Pengumpulan sumber*, menurutnya sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber sendiri dapat dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artefak.
4. *Verifikasi* (kritik sejarah, keabsahan sumber), hal tersebut dibagi dalam beberapa macam konsep, seperti autentisitas, atau keaslian sumber,

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001).

atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai, atau kritik intern.

5. *Interpretasi*, dalam kaitannya terhadap penulisan sejarah, Kuntowijoyo sendiri menekankan kepada data dan keterangan yang valid dalam melakukan penafsirannya. Sejarawan yang jujur menurutnya akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu berasal. Interpretasi sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu *Analisis* yang berarti menguraikan dan *Sintesis* yang berarti menyatukan.
6. *Historiografi*, yang mempunyai artian penulisan sejarah dimana aspek kronologis dan periodisasi mempunyai artian yang penting dalam penulisan, hal inilah yang akan menjadi tugas tertinggi dari seorang sejarawan tersebut.

Berkaca kepada tahapan-tahapan ini, dalam hemat penulis metode sejarah tersebut dapat pula dijadikan sebagai alat dalam menginterpretasikan kejadian-kejadian semasa yang belum lama terjadi untuk kemudian dibedah guna disarikan sebagai suatu tulisan sejarah.

Kemajuan teknologi komunikasi adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan, hal ini menjadi tantangan bagi para sejarawan-sejarawan generasi baru untuk merekonstruksi cara kerja agar lebih sesuai dengan zaman yang berubah dengan cepat belakangan ini¹⁷. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa kontemporer yang semakin banyak terekam dan terjadi disekitaran kita akibat luapan informasi yang mendera belakangan ini dapat pula dijadikan peluang bagi para sejarawan untuk dapat mengkontribusikan keilmuan mereka bagi khalayak masyarakat.

¹⁷ Agus Suwignyo, “Kita and Dunia Kontemporer (Atau Mengapa Sejarawan Harus Menyesuaikan Cara Kerjanya Dengan Tuntutan Perkembangan Teknologi Informasi Digital),” *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities* 2, no. 2 (2018): 393–404.

KESIMPULAN

Walaupun sumber-sumber yang dikaji terkesan masih hangat dan seakan baru saja terjadi, periode pers pasca Orde Baru merupakan masa yang menarik untuk diteliti oleh para sejarawan. Asalkan melalui metodologi yang benar, peristiwa-peristiwa masa lalu kontemporer selalu dapat dituliskan menjadi sebuah kisah yang dapat menarik khalayak masyarakat dan cendekia, khususnya dalam bidang keilmuan lain diluar keilmuan sejarah. Munculnya pendekatan-pendekatan *interdisipliner* juga tak pelak memberikan pemahaman baru dimana sejarah dapat pula berdampingan dengan keilmuan-keilmuan lain untuk dapat membongkar fenomena-fenomena yang ada guna dicarikan solusinya untuk kemaslahatan masyarakat dan umat manusia yang ada pada masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Akhmad Zaini. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 1995.
- Adam, Ahmat. *Sejarah Awal Pers Dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Danil Mahmud Chaniago, Umi Rusmiani Umairah. "Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 16 (2018): 27–43. <https://doi.org/10.15548/khazana.h.v0i0.72>.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Godfried Hariowald Von Faber. *A Short History of Journalism in Dutch East Indies*. Surabaya: G. Kolff & Company, 1930.
- Gonggong, Anhar, ed. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005.
- Hill, David T. *Pers Di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- J Heru Margianto dan Asep Syaefullah. *Media Online: Pembaca, Laba, Dan Etika Problematika Praktik Jurnalisme Online Di Indonesia*. Jakarta: AJI Indonesia – Ford Foundation, 2014.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- Kusuma, Satria. "Posisi Media Cetak Di Tengah Perkembangan Media Online Di Indonesia." *Interact Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atma Jaya* 5, no. 1 (2016).
- Mirjam Maters. *Dari Perintah Halus Ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan Dan Pemberangusan 1906-1942*. Jakarta: Hasta Mitra dan Pustaka Utan Kayu, 2003.
- Smith, Edward Cecil. *Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia*. Jakarta: Graffiti Pers, 1983.
- Surjomiharjo, Abdurrachman. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, 1980.
- Suwignyo, Agus. "Kita and Dunia Kontemporer (Atau Mengapa Sejarawan Harus Menyesuaikan Cara Kerjanya Dengan Tuntutan Perkembangan Teknologi Informasi Digital)." *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities* 2, no. 2 (2018): 393–404.
- Utama, Nanda Julian. "Slogan-Slogan Kebohongan: Propaganda-Propaganda Politik Jepang Tentang Perang Pasifik Pada Koran Asia Raya Di Indonesia 1944-1945." In *International Conference on Language, Culture, and Society 2015*

50 Pers Pasca Orde Baru...

(*ICLCS*). Jakarta: Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, 2015.